

NASKAH PUBLIKASI

**PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 KALIJAMBE**



Oleh :

MUHAMMAD RAQIB
Q100 120 081

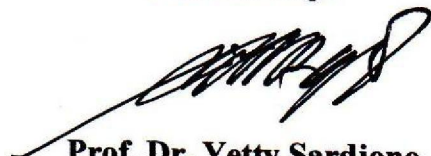
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

NASKAH PUBLIKASI

PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 KALIJAMBE


Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Yetty Sardjono

Pembimbing II



Dr. Sabar Narimo, MM., M.Pd.

PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 KALIJAMBE

Oleh

Muhammad Raqib¹, Yetty Sardjono², dan Sabar Narimo³

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana UMS, raqib.muhammad@gmail.com

^{2), 3)} Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan; 1) memperoleh gambaran umum peran komite sekolah dalam kebijakan dalam pengembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Kalijambe, 2) mengetahui peran komite sekolah dalam pengelolaan sumber pembiayaan di SMP Negeri 2 Kalijambe, 3) menemukan peran komite sekolah evaluasi diri di SMP Negeri 2 Kalijambe.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma naturalistik. Pelaksanaan penelitian di SMP Negeri 2 Kalijambe. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisa data menggunakan analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*).

Hasil penelitian ini adalah: 1) Peran komite sekolah dan sekolah dalam kebijakan pembiayaan pendidikan di SMP meliputi komponen-komponen yang harus dibiayai oleh sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. 2) peran komite sekolah dalam pengelolaan sumber pembiayaan dalam pengembangan pendidikan pada sekolah menengah pertama negeri adalah dana dari pemerintah dan dana BOS. 3) Bentuk partisipasi komite sekolah dalam kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di SMP ada 4, yaitu a) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan; b) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pendukung; c) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pengontrol; dan d) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Mediator.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Pembiayaan Pendidikan, Anggaran Pendidikan

Abstract

The aim of this research are. 1) obtain an overview of the role of the school committee and the school established a policy in the education development at SMP Negeri 2 Kalijambe, 2) determine the sources of finance in the education development at SMP Negeri 2 Kalijambe, 3) find a school committee participation in formulation, implementation and evaluation policy of the Plan Budget School at SMP Negeri 2 Kalijambe. This research is a qualitative research with naturalistic paradigm approach. The location of this research at SMP Negeri 2 Kalijambe. Data was collected by interview, observation and document. Data analysis technique using an interactive model analysis. Results of this research, are: 1) The role of schools and school committees in education funding policy at junior high school include the components that should be funded by the school in

order to provide education. 2) Sources of finance in the development of education at junior high schools are funds from the government and BOS (School Operational Assistance). 3) School committee participation in formulation, implementation and evaluation policy of the Plan Budget School at junior high school are a) School Committee participation as giving advisory; b) School Committee participation as supporter; c) School Committee participation as controller; and d) School Committee participation as mediator.

Keywords: School Committee, Education Finance, Education Budget

PENDAHULUAN

Komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah (Mulyono, 2008: 258). Menurut Permadi dan Arifin (2010: 31) tujuan dari pembentukan Komite Sekolah, yaitu adanya suatu organisasi "Masyarakat Sekolah" yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas peserta didik.

Kedudukannya sebagai mitra sekolah dalam pembiayaan pendidikan peran komite terutama pada bagaimana komite memberi masukan pada penyusunan RAPBS. Partisipasi komite sekolah dalam penentuan kebijakan anggaran yang menyangkut RAPBS terdiri dari tiga hal yaitu partisipasi komite dalam penyusunan anggaran dan belanja sekolah, partisipasi dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan RAPBS serta partisipasi dalam bentuk evaluasi terhadap kinerja komponen sekolah menyangkut realisasi penggunaan anggaran sekolah

Kebijakan ekonomi dalam pendidikan pada pelaksanaan penyusunan anggaran di Sragen menyertakan peran Komite Sekolah juga. Menurut Permadi dan Arifin (2010: 30) komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga nonpolitis dan nonprofit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Peran komite sekolah pada dalam anggaran pendidikan dilakukan dengan mengikuti rapat-rapat yang diadakan sekolah. Namun terdapat beberapa anggota komite sekolah yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Ketidakhadiran beberapa

anggota komite sekolah, perlu mendapat perhatian, agar pengelolaan anggaran tidak terjadi penyimpangan. Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk diteliti. Penelitian dengan tema, kebijakan ekonomi dalam pendidikan di Sragen, dengan judul, **“Partisipasi Komite Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan di SMP Negeri 2 Kalijambe”**.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memperoleh gambaran umum peran komite sekolah dan sekolah menetapkan kebijakan dalam pengembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Kalijambe, 2) mengetahui sumber-sumber pembiayaan dalam pengembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Kalijambe, 3) menemukan bentuk partisipasi komite sekolah dalam kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di SMP Negeri 2 Kalijambe.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *paradigma naturalistik*. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kalijambe dengan alokasi waktu pada awal semester satu tahun pelajaran 2014/2015 yaitu bulan Agustus - September 2014.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2008: 16) dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan. Pemberdayaan Komite Sekolah dapat diwujudkan diantaranya melalui pelibatan mereka dalam penyusunan rencana dan program sekolah,

RAPBS, pelaksanaan program pendidikan dan penyelenggaraan akuntabilitas pendidikan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2014) menyatakan bahwa Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran sekolah. Partisipasi ini dilakukan dengan memberikan pertimbangan, kontrol, advokasi dan pengawasan dari perencanaan, pelaksanaan dan anggaran sekolah.

1. Peran Komite Sekolah dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan

Berdasarkan penelitian di atas, ditemukan kebijakan pembiayaan dalam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri, kebijakan sekolah yang berkaitan dengan pendanaan dalam mengelola kebutuhan sekolah agar operasional sekolah dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan pembiayaan dalam pendidikan di SMP meliputi komponen-komponen yang harus dibiayai oleh sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Komponen-komponen yang harus dibiayai oleh sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan meliputi: operasional, perawatan, pelaksanaan pelajaran sekolah, tata usaha sekolah, pemeliharaan sekolah, gaji, porseni sekolah, penyelenggaraan UAN dan USEK, penyelenggaraan tes, pembinaan pengelolaan dan pelaporan, pendataan, kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan, lain-lain.

Seluruh komponen yang harus dibiayai sekolah tersebut termasuk dalam anggaran komprehensif, seperti yang disampaikan oleh Anthony (2004: 47) bahwa anggaran komprehensif merupakan anggaran yang secara lengkap dan menyeluruh dari kegiatan di dalam instansi yang bersangkutan, contoh: anggaran yang mencakup seluruh kegiatan dalam instansi pendidikan, yaitu anggaran kegiatan administrasi, anggaran pembangunan sarana prasarana, anggaran peningkatan mutu guru dan tenaga kantor, anggaran kegiatan pembelajaran, anggaran kegiatan ujian semester dan ujian nasional, dan anggaran lain yang telah disusun dalam RAPBS.

2. Peran Komite dalam pengelolaan Sumber-sumber Pembiayaan dalam Pengembangan Pendidikan

Berdasarkan penelitian diketahui sumber-sumber pembiayaan dalam kebijakan pengembangan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Pengalokasian anggaran tersebut disusun dalam sebuah rencana anggaran, yaitu Rencana Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan anggaran dilakukan untuk merealisasikan rencana serta sebagai proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi setiap program dan aktifitas dalam bentuk satuan uang. RAPBS dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan program sekolah selama satu tahun mendatang. Setiap awal tahun pelajaran SMP negeri selalu menyusun RAPBS.

Proses penyusunan RAPBS di Sekolah meliputi; indentifikasi kegiatan atau kebutuhan yang akan dilaksanakan selama periode anggaran; indentifikasi sumber-sumber dana; Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh pihak SMP; Mengusulkan draf yang telah disusun oleh kepala sekolah bersama guru kepada pihak komite sekolah; melakukan revisi terhadap usulan anggaran; Sekolah dibantu oleh Komite Sekolah melakukan sosialisasi kepada semua orang tua wali murid; dan terakhir melakukan revisi secukupnya dan pengesahan. Sumber anggaran pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah dana dari pemerintah dan dana BOS.

Dari segi fleksibilitas, dana dari pemerintah dan dana BOS termasuk dalam jenis anggaran tetap, hal ini sesuai dengan teori dari Anthony (2004: 46) yaitu anggaran tetap merupakan anggaran yang disusun atas dasar satu tingkat kapasitas tertentu seperti anggaran BOS, APBD I dan APBD II.

Proses penyusunan RAPBS ini, kepala sekolah perlu melibatkan guru dan komite sekolah agar penggunaannya nanti lebih efektif. Pentingnya peran komite sekolah ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2014) bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan

pengelolaan dana operasional sekolah (BOS) yang tidak melibatkan guru dan komite sekolah, penggunaannya menjadi tidak efektif. Tidak adanya peran komite sekolah menimbulkan tidak terwujudnya keinginan *stakeholder* sekolah khususnya guru dan komite sekolah karena tentu saja kepala sekolah tidak mungkin dirinya bisa mengakomodasi kebutuhan sekolah. Kepala Sekolah tidak bisa memahami semua kondisi sekolah tanpa bantuan atau dukungan guru lainnya.

3. Peran Komite Sekolah dalam Evaluasi Diri di Sekolah Menengah Pertama

Berdasarkan penelitian diketahui partisipasi komite dalam kebijakan pembiayaan pendidikan adalah pengawasan dan evaluasi. Komite Sekolah dapat terlibat aktif dalam setiap rapat yang diadakan oleh sekolah dalam mendiskusikan kegiatan yang harus dilaksanakan sekolah. Komite dapat memberikan masukan atau bahan-bahan pertimbangan kepada Sekolah, serta Komite Sekolah dapat memberikan penyelesaian masalah ketika ada kegiatan yang tidak tertuang dalam RAPBS.

Dalam pelaksanaan dana pendidikan, mestinya ada proses pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi. Hal ini didasarkan pada salah satu fungsi komite sekolah adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2014) bahwa pada pengawasan di sekolah, Komite bersama-sama dengan masyarakat untuk memantau pencapaian kinerja anggaran sekolah. Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, baik dari pihak pemerintah, Komite sekolah dan juga dari masyarakat. Hasil pelaksanaan penggunaan dana tersebut selanjutnya dikaji dan dievaluasi untuk mengetahui kualitas pengembangan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur keseriusan sekolah dalam menggunakan dana anggaran pendidikan. Partisipasi pengawasan oleh komite terhadap pelaksanaan dana pendidikan terbatas, karena pengawasan penuh penggunaan dana pendidikan berada pada wewenang dinas pendidikan dan Kepala Sekolah.

Komite Sekolah dapat mengadakan evaluasi pelaksanaan anggaran melalui laporan yang dibuat oleh pihak sekolah sebelum ikut menanda tangani laporan tersebut. Jika memang sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan, maka laporan itu disahkan oleh ketua Komite Sekolah dan selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada wali murid dalam pertemuan per semester saat penerimaan raport. Dalam pertemuan itulah para wali murid bisa menanyakan berbagai hal berkenaan dengan laporan yang dibuat oleh sekolah.

Bentuk evaluasi dari masyarakat dan wali murid bisa disampaikan secara lisan saat pertemuan maupun secara tertulis. Dalam rapat pihak sekolah menyediakan kertas untuk memberikan kesempatan pada peserta rapat yang ingin menyampaikan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan. Lewat cara ini pihak sekolah akan tahu apa sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat dan wali murid, sebagai bahan acuan untuk perbaikan di masa mendatang.

Bentuk partisipasi komite sekolah dalam dalam kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi ada 4, yaitu 1) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan; 2) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pendukung; 3) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pengontrol; dan 4) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Mediator. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2014) yang menunjukkan bahwa dalam Manajemen Berbasis Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran sekolah. Partisipasi ini dilakukan dengan memberikan pertimbangan, kontrol, advokasi dan pengawasan dari perencanaan, pelaksanaan dan anggaran sekolah.

Partisipasi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan ditunjukkan dalam penyusunan perencanaan program sekolah. Dengan memberikan saran dan masukan yang intinya juga merupakan saran dari beberapa orang tua siswa yang telah mempercayakan ketua komite sekolah sebagai wakil mereka di sekolah. Salah satu saran yang mereka sampaikan adalah membuat program pendidikan terjangkau yang melibatkan orang tua siswa.

Komite sekolah juga ikut berpartisipasi dalam proses belajar mengajar dengan memberikan masukan pada guru terhadap proses pembelajaran telah dilakukan melalui rapat sekolah, antara lain dengan memberikan masukan tentang tersedianya buku-buku pelajaran, dan media pembelajaran lainnya demi kelancaran proses belajar siswa. Masukan lainnya adalah pemberian tugas rumah yang tidak terlalu membebani siswa, mengingat kemampuan rata-rata pendidikan orang tua siswa hanya sebatas mendampingi saja. Komite sekolah juga berdasarkan saran dari orang tua siswa memberikan masukan pada sekolah, agar dapat meminjamkan buku pelajaran untuk siswa khususnya siswa kelas satu dan kelas dua yang belum lancar membaca.

Partisipasi Komite Sekolah sebagai pendukung terutama dalam pelaksanaan anggaran ini bisa dilihat dari bagaimana keikutsertaan Komite Sekolah dalam mengusahan dana dan pelaksanaan dana baik yang bersumber dari pusat, dari orang tua murid maupun dari masyarakat. Untuk sumber dana yang datang dari pusat yaitu BOS, Komite Sekolah hanya sekedar mengetahui. Namun untuk dana yang dari masyarakat, baik berupa dana iuran komite maupun dana pengembangan pendidikan untuk siswa baru, Komite Sekolah ikut terlibat secara langsung mulai dalam pengambilan keputusan untuk menentukan besarnya sumbangan sampai pada sosialisasinya kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Mestry (2006) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa kolaborasi antara semua *stakeholder* termasuk komite sekolah dalam transparansi pengambilan keputusan dan prosedur diperlukan untuk memastikan manajemen keuangan sekolah yang efektif dan efisien. Keputusan yang berkaitan dengan masalah keuangan yang diambil oleh komite keuangan sekolah harus selalu diratifikasi oleh Badan Sekolah, karena badan ini tetap bertanggung jawab atas dana sekolah meskipun sebagian besar fungsi keuangan dapat didelegasikan kepada komite keuangan sekolah.

Dalam pelaksanaannya, untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan sudah pasti ada aturannya, misalnya untuk kesejahteraan guru, pengadaan alat peraga, pengadaan buku, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan alat rumah tangga, penyelenggaraan UASBN dan UAS dan sejenisnya, Komite Sekolah

hanya sekedar mengetahui saja, namun untuk pengeluaran yang lain misalnya perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi perbaikan meja kursi, pintu gerbang, daun pintu, WC, perbaikan sekat kelas, dan pembuatan internet, Komite Sekolah ikut terlibat secara langsung. Artinya Komite Sekolah ikut berperan mulai dari pengambilan kebijakan tentang sarana apa yang perlu diperbaiki, jumlah dana yang diperlukan, sampai pada siapa tenaga yang harus mengerjakan, dan bagaimana hasilnya. Dalam hal ini Komite Sekolah telah melaksanakan fungsinya sebagai badan pendukung sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau memobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah.

Partisipasi Komite Sekolah sebagai pengontrol dilakukan melalui pengontrolan secara tidak langsung pada proses pengambilan keputusan di sekolah. Komite sekolah telah memberikan saran-saran untuk pendidikan di sekolah, tapi dalam realisasi dan pengambilan keputusan, komite sekolah tidak banyak melakukan pengontrolan. Setelah menjadi suatu konsep perencanaan pengembangan sekolah, ketua komite hanya ikut mengesahkan saja. Hanya pada bantuan pengadaan seragam siswa yang diperoleh sekolah, komite sekolah menyarankan untuk diuangkan saja dan tidak diberikan seluruhnya kepada siswa yang bersangkutan, tapi diberikan juga kepada siswa lainnya yang membutuhkan tapi tidak tercover dalam nama penerima bantuan. Komite sekolah ikut memantau pelaksanaannya.

Pengontrolan oleh komite sekolah juga dilakukan terhadap kualitas beberapa program yang ada di sekolah, namun masih kurang perannya dalam melakukan pengawasan. Kurangnya peran komite sekolah dalam melakukan pengawasan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nemes (2013) yang menunjukkan bahwa mendapatkan komite sekolah yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan bukan hanya dari segi infrastruktur tetapi juga dalam hal kesiapan akses langsung pada orang tua yang berpendidikan dan anggota masyarakat untuk menjadi komite sekolah. Faktor lokasi sekolah ikut menentukan tipe orang tua yang akan menjadi anggota komite sekolah. Masalahnya semakin diperparah oleh kurangnya pelatihan bagi anggota komite yang setidaknya akan

mempersenjatai mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk secara efektif mengambil bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sekolah.

Partisipasi komite sekolah sebagai mediator dilakukan melalui pemberian masukan-masukan yang merupakan aspirasi dari masyarakat yang mereka sampaikan pada komite sekolah melalui percakapan-percakapan tidak resmi atau melalui pesan singkat lewat telepon yang diteruskan oleh ketua komite kepada kepala sekolah disaat rapat sekolah. Partisipasi komite sekolah sebagai mediator lainnya adalah mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat. “Berbagai kebijakan dan program sekolah yang penting untuk diketahui masyarakat diberitahu langsung oleh kepala sekolah secara garis besarnya saja pada rapat penerimaan buku laporan pendidikan yang diadakan sekolah. Sekolah mengadakan rapat setiap enam bulan sekali yaitu pada rapat penerimaan BLP. Pentingnya pengadaaan rapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mestry (2006) bahwa sangat penting bagi komite ini untuk melakukan pertemuan rutin untuk membahas masalah keuangan. Anggota komite harus berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab keuangan. Keputusan yang berkaitan dengan masalah keuangan yang diambil oleh komite keuangan sekolah harus selalu diratifikasi oleh Badan Sekolah, karena badan ini tetap bertanggung jawab atas dana sekolah meskipun sebagian besar fungsi keuangan dapat didelegasikan kepada komite keuangan sekolah.

Dalam hubungan sekolah dan masyarakat, fenomena kurangnya jalinan kerjasama sekolah dengan komite sekolah (masyarakat) dalam proses penyelenggaraan pendidikan bisa saja terjadi. Padahal, seharusnya antara pihak sekolah, komite sekolah dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pendidikan itu harus berjalan bersama-sama dan seimbang. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, fenomena ini akan menjadi suatu sebab terjadinya ketimpangan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, adanya ketidakproporsionalan dalam proses dan penentuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, dan adanya ketidakmaksimalan atas peran dan

fungsi komite sekolah sebagai representasi masyarakat luas. Walaupun apa yang dilakukan oleh pihak sekolah di masa yang akan datang, tetapi kalau tidak mengikutsertakan komite sekolah, sebagai pihak yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan pendidikan, maka tentu akan menjadikan citra pendidikan di mata masyarakat menurun (tidak baik). Sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa tidak sedikit dari masyarakat masih menganggap bahwa biaya pendidikan itu mahal (tinggi), di luar kemampuan mereka, dan pada akhirnya mereka merasa terbebani.

Padahal, jika semua pihak yang terkait dengan penyelenggara pendidikan, tidak hanya pihak sekolah saja, memahami apa dan bagaimana tujuan, peran dan fungsi komite sekolah ini, asumsi masyarakat terhadap biaya pendidikan tentu tidak akan demikian, dan mereka juga tidak akan merasa terbebani atas biaya tersebut. Karena bagaimanapun, jika semua pihak memahami peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan, maka biaya pendidikan yang menjadi tanggungan orang tua siswa (secara khusus) dan masyarakat tidak akan keberatan. Karena kebijakan tentang biaya pendidikan itu telah diputuskan bersama-sama. Sehingga keterbukaan (*transparansi*) atas semua kebijakan yang diambil pihak sekolah merupakan suatu langkah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mwinjuma & Baki (2012) bahwa dengan memperkuat sistem melalui peningkatan kapasitas pemberdayaan kepala sekolah dan komite sekolah dengan pengetahuan dan keterampilan serta transparansi kebutuhan, masalah keuangan sekolah dapat secara terbuka dan dengan cepat ditangani. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterbukaan antara pihak sekolah dengan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah dapat memperlancar kebutuhan keuangan sekolah.

Masalah lain dari komite sekolah adalah kurangnya pelatihan komite sekolah dan latar belakang orang tua anggota komite sekolah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nemez (2013) menunjukkan bahwa komite sekolah yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan bukan hanya dari segi infrastruktur tetapi juga dalam hal kesiapan

akses langsung pada orang tua yang berpendidikan dan anggota masyarakat untuk menjadi komite sekolah. Faktor lokasi sekolah ikut menentukan tipe orang tua yang akan menjadi anggota komite sekolah. Masalahnya semakin diperparah oleh kurangnya pelatihan bagi anggota komite yang setidaknya akan mempersenjatai mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk secara efektif mengambil bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sekolah.

Pentingnya pelatihan bagi komite sekolah tersebut diperkuat oleh penelitian dari Mupindu (2012) yang menjelaskan bahwa komite pengembangan sekolah perlu dilatih untuk memahami peran mereka. Pelatihan ini akan membantu komite sekolah, kepala sekolah dan guru dalam konsep tugas mereka yang lebih baik. Diperlukan juga pelatihan manajemen keuangan dasar seperti komite pengembangan sekolah diberi mandat untuk mengelola keuangan sekolah. Pelatihan manajemen keuangan dasar berguna untuk melihat kebutuhan peningkatan biaya dalam tingkat yang wajar. Selain itu, diperlukan juga pengawasan dan evaluasi kerja komite sekolah dan memberi pelatihan yang berkesinambungan melalui kegiatan *workshop* rutin.

1. SIMPULAN

a. Peran Komite Sekolah dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan

Peran komite sekolah dan sekolah dalam kebijakan pengembangan pendidikan dilaksanakan dengan koordinasi untuk mengelola kebutuhan sekolah, sehingga sekolah dapat menetapkan kebijakan agar operasional sekolah dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan pembiayaan dalam pendidikan di SMP meliputi komponen-komponen yang harus dibiayai oleh sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Komponen-komponen yang harus dibiayai oleh sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan meliputi: operasional, perawatan, pelaksanaan pelajaran sekolah, tata usaha sekolah, pemeliharaan sekolah, gaji, porseni sekolah, penyelenggaraan UAN dan

USEK, penyelenggaraan tes, pembinaan pengelolaan dan pelaporan, pendataan, kegiatan ekstra kurikuler, perpustakaan, lain-lain.

b. Sumber-sumber Pembiayaan dalam Pengembangan Pendidikan

Sumber pembiayaan dalam pengembangan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Pengalokasian anggaran tersebut disusun dalam sebuah rencana anggaran, yaitu Rencana Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan anggaran dilakukan untuk merealisasikan rencana serta sebagai proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi setiap program dan aktifitas dalam bentuk satuan uang. RAPBS dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan program sekolah selama satu tahun mendatang. Setiap awal tahun pelajaran SMP negeri selalu menyusun RAPBS. Proses penyusunan RAPBS di Sekolah meliputi; indentifikasi kegiatan atau kebutuhan yang akan dilaksanakan selama periode anggaran; indentifikasi sumber-sumber dana; Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh pihak SMP; Mengusulkan draf yang telah disusun oleh kepala sekolah bersama guru kepada pihak komite sekolah; melakukan revisi terhadap usulan anggaran; Sekolah dibantu oleh Komite Sekolah melakukan sosialisasi kepada semua orang tua wali murid; dan terakhir melakukan revisi secukupnya dan pengesahan. Sumber anggaran pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah dana dari pemerintah dan dana BOS.

c. Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap RAPB Sekolah

Partisipasi komite dalam kebijakan pembiayaan pendidikan adalah pengawasan dan evaluasi. Komite Sekolah dapat terlibat aktif dalam setiap rapat yang diadakan oleh sekolah dalam mendiskusikan kegiatan yang harus dilaksanakan sekolah. Komite dapat memberikan masukan atau bahan-bahan pertimbangan kepada Sekolah, serta Komite Sekolah dapat

memberikan penyelesaian masalah ketika ada kegiatan yang tidak tertuang dalam RAPBS.

Bentuk partisipasi komite sekolah dalam kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi ada 4, yaitu 1) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan; 2) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pendukung; 3) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pengontrol; dan 4) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Mediator.

2. DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. John Dearden & Norton. 2004. *"Sistem Pengendalian Manajemen"*, (terjemahan), Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi dan Yuliana, Lia. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ismanto, Bambang. 2014. "Public Participation in Budget Management School in Salatiga of Central Java Province, Indonesia". *Proceedings Book of ICETSR*, 2014, Malaysia, Handbook on the Emerging Trends in Scientific Research.
- Mestry, Raj. 2006. "The Functions of School Governing Bodies in Managing School Finances". *South African Journal of Education*, Vol 26(1)27–38.
- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. 2008. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mupindu. 2012. *"The Capacity of the School Development Committees/ Associations towards Providing School Instructional Resources in Zimbabwe"*. *Online Journal of Social Sciences Research*, Volume 1, Issue 7, pp 200-212; October 2012.
- Nemes, Joyce. 2013. "School Committees in the Context of Preparing and Implementing Whole School Development Planning". *Journal of Education and Practice*, Vol.4, No.7, 2013.
- Permadi, Dadi dan Arifin, Daeng. 2010. *Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Komite Sekolah*. Bandung: PT. Sarana Panca Karya Nusa.
- Widiyanto, Yohanes N. 2014. "Pesan untuk Mendikbud Baru". *Artikel*. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/kolom/2014/10/31/1756/Pesan-untuk-Mendikbud-Baru>.